

KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MANADO DALAM PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAERAH

Oleh

Yohanes F.C. Ransun¹

Freddie Kalangie²

Yurnie Sendow³

Abstrak

Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan. Salah satu pihak yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan khususnya di tingkat daerah adalah Pemerintah Daerah itu sendiri. Pembangunan infrastruktur jalan adalah sebuah pelayanan yang diberikan oleh Negara kepada rakyat sebagai unsur pembangunan nasional. Pemerintah Pusat sendiri telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di bidang infrastruktur jalan dan jembatan, baik untuk pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan ke dalam Anggaran Dinas Pekerjaan Umum. Untuk Pemerintah Daerah, dana untuk pembangunan jalan dan jembatan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah masing-masing daerah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesiaa Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan yaitu bahwa: “*Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program*”.

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum selaku SKPD yang diberikan amanat untuk pemeliharaan jalan daerah sangatlah disoroti mengingat jalan merupakan sarana utama yang selalu dipakai oleh masyarakat. Penelitian ini mencoba melihat dan menguraikan mengenai kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado dalam pemeliharaan jalan di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk dapat menggali lebih dalam dan akurat tentang kinerja organisasi ini. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado dalam pemeliharaan jalan masih buruk dan terkesan pembuatan dan pemeliharaan jalan hanya asal-asalan saja.

Kata Kunci : Kinerja, Dinas Pekerjaan Umum, Jalan Daerah

¹ Mahasiswa Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol - Unsrat

² Ketua Penguji/ Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/ Pembimbing Skripsi

PENDAHULUAN

Setiap negara di dunia ini memiliki tujuan untuk mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Negara Republik Indonesia juga memiliki tujuan yang sama, sehingga untuk mewujudkan keinginan tersebut diperlukan manajemen pemerintahan yang baik. Salah satu yang menjadi upaya pemerintah dalam mensejahterahkan masyarakat Indonesia adalah dengan menyediakan Sarana dan Prasarana infrastruktur jalan. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Jalan merupakan prasarana infrastruktur dasar yang dibutuhkan manusia untuk dapat melakukan pergerakan dari satu lokasi ke lokasi lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Ketersediaan jalan menjadi hal yang dianggap mendesak manakala kegiatan ekonomi masyarakat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan Bagian kesatu pasal 57 ayat (1), menjelaskan bahwa *Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada pemerintah dan pemerintah daerah.*

Pemeliharaan infrastruktur jalan di Kota Manado sampai sekarang ini belum dapat dikatakan baik, itu di karenakan kurangnya perhatian Pemerintah daerah dalam pemeliharaan infrastruktur jalan yang dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado sehingga di beberapa titik jalan di kota manado masih mengalami kerusakan seperti contoh munculnya lubang di sekitaran jalan dan bahkan sampai di tengah jalan. Dalam pemeliharaan jalan bukan hanya bagian jalanya yang harus di perhatikan tetapi beberapa bagian konstruksi jalan juga harus di perhatikan, seperti struktur perkerasan jalan, bahu jalan, trotoar, drainase jalan dan struktur lain pendukung jalan. Tapi dari pra observasi yang saya lakukan ada beberapa titik jalan yang dalam pemeliharannya hanya mengutamakan jalan yang di lalui oleh kendaraan bermotor, sehingga menyebabkan kapasitas jalan tidak bertahan lama. hal ini membuat masyarakat mengalami

ketidaknyamanan saat menggunakan sarana dari pemerintah ini.

Hal ini menyebabkan timbulnya pemikiran – pemikiran kritis dari masyarakat yang menganggap bahwa pemerintah hanya menjadikan pembangunan infrastruktur jalan sebagai alasan agar supaya setiap dana yang dialokasikan untuk pembangunan dan perawatan infrastruktur jalan dapat di sisipkan untuk kepentingan personal, sehingga dana yang seharusnya di gunakan untuk kepentingan daerah dan masyarakat tidak digunakan sebagai mana mestinya, hal ini menimbulkan keraguan bagi masyarakat karena pemerintah tidak bekerja sesuai harapan masyarakat.

Terkait dengan masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: “Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Daerah”

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan daerah.
2. Bagaimana kualitas layanan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado dalam melayani keluhan masyarakat tentang pemeliharaan infrastruktur jalan.
3. Kemampuan Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado dalam mengenali kebutuhan masyarakat.
4. Melaksanakan tugas administrasi dengan benar dan sesuai dengan prinsip – prinsip administrasi.
5. Melaporkan hasil penggunaan keuangan secara terbuka (transparansi)

Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kinerja

Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *profit oriented* dan *non profit oriented* yang dihasilkan selama satu periode waktu. Secara lebih jelas **Amstrong dan Baron** (1998:15) mengatakan kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi. Lebih jauh **Indra Bastian** (1997:128) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi.

Dalam keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kinerja adalah Gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan stratejik instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Gibson, Ivancevich dan Donnelly (1997 : 41) mengemukakan bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Batasan tersebut mengandung makna bahwa kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Hal yang sama dinyatakan oleh **Rival dan Basri** (2005:42) bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standart hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama. Sedangkan **Harsey dan Blanchard** (1988 : 42) menyatakan kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan

kemampuan.

Menurut **Dessler** (2000 : 41) Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan. Konsepsi lain berpendapat bahwa kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan dalam melakukan suatu pekerjaan (**Robbins**, 2000 : 45). Menurut pendekatan menurut perilaku manajemen, kinerja adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang di hasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan (**Luthans**, 2005 : 45). Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dinyatakan kinerja adalah sebagai ekspresi potensi berupa perilaku atau cara seseorang atau kelompok orang dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas sehingga menghasilkan suatu produk yang merupakan wujud dari semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan kepadanya.

Chaizi Nasucha (2005:129) mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah sebagai efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenan dengan usaha – usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhannya secara efektif. Ada hubungan kuat antara kinerja, ini sebagaimana yang dikemukakan oleh **Erwin** (2009:131) bahwa kinerja adalah prestasi kerja. Dan lebih jauh menurut **Peter dan Yeni Salim** (2010:131) prestasi kerja merupakan hasil kerja yang diperoleh dari melaksanakan tugas yang dibebankan kepada seseorang. Hasil dan kualitas prestasi kerja yang maksimal tidak dapat dilepaskan oleh hasil yang dibangun oleh pihak manajemen perusahaan ini karena tidak mungkin suatu prestasi kerja bagus itu bisa diperoleh tanpa ada penanganan yang serius dan mendalam dari pihak manajemen perusahaan. Ini seperti yang di ungkapkan oleh **Taylor** (1994:132) bahwa manajemen perlu melakukan beberapa tindakan untuk menjamin agar perusahaannya mampu menghadapi masalah di masa depan.

Oleh sebab itu, kinerja dapat di ukur berdasarkan tiga aspek, yaitu perilaku dalam melaksanakan tugas, kegiatan atau cara untuk menghasilkan suatu hasil kerja. Dengan kata lain, dapat dinyatakan kinerja merupakan

hasil, baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh suatu organisasi dalam melaksanakan tugas – tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sementara itu **Edison Sihombing** dalam salah satu artikelnya yang berjudul “Mencermati Pendirian BUMN” menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan komponen penting dalam sistem manajemen yang berperan dalam mengkomunikasikan, memotivasi, dan menelusuri pencapaian strategis. Selanjutnya Edison menambahkan bahwa pengukuran kinerja memberi umpan balik kepada manajemen dalam bentuk informasi mengenai pelaksanaan suatu rencana dan titik – titik dimana perubahan memerlukan penyesuaian – penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian.

Indikator Kinerja

Indikator kinerja (*performance Indicator*) indikator kadang - kadang digunakan secara bergantian dengan pengukuran kinerja (*performance measures*), tetapi banyak pula yang membedakannya. Pengukuran kinerja berkaitan dengan hasil yang dapat dikuantitatifkan dan mengusahakan data setelah kejadian, sementara itu, indikator kinerja dipakai untuk aktivitas yang dapat ditetapkan secara lebih kualitatif atas dasar perilaku yang diamati (Wibowo 2010:128)

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran/tujuan (Bastian 2001 : 33 dalam buku manajemen publik) yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan elemen – elemen indikator berikut ini :

1. Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar organisasi mampu menghasilkan produknya, baik barang atau jasa yang meliputi sumber daya manusia, informasi, kebijakan dan sebagainya.
2. Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik ataupun nonfisik.
3. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang terkait dengan

tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

4. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Agus Dwiyanto dalam Pasolong (2013:178) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu:

1. **Produktivitas**, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dengan output.
2. **Kualitas Layanan**, banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik yang muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas. Dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik.
3. **Responsivitas**, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program – program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. **Responsibilitas**, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
5. **Akuntabilitas**, yaitu menunjuk seberapa besar kebijakan dan kegiatan

birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

Konsep Infrastruktur

a. Definisi dan Pengertian Infrastruktur

Infrastruktur merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan fasilitas yang sengaja dibuat untuk mendukung aktivitas kehidupan manusia. Infrastruktur biasanya sengaja dibangun untuk bisa membantu dan mempermudah suatu kegiatan tertentu seperti transportasi, pendataan penduduk, dan berbagai macam kegiatan lainnya. Infrastruktur publik biasanya dibangun oleh pemerintahan dari hasil uang rakyat yang dikumpulkan melalui pembayaran pajak. Beberapa contoh infrastruktur publik yang dibangun oleh pemerintah yaitu jalan raya, bandara, stasiun, gorong-gorong, kantor polisi, dan berbagai macam infrastruktur publik lainnya.

Menurut **Grigg** (1988) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem dan dalam sebuah sistem infrastruktur adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Hal tersebut dikarenakan infrastruktur dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasardasar dalam mengambil kebijakan (**Kodoatie**, 2005:14).

Berdasarkan American Public Works Association (**Stone**, 1974:12), infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas – fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen – agen publik untuk fungsi – fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan pelayanan – pelayanan yang sama untuk

memfasilitasi tujuan – tujuan ekonomi dan sosial.

Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan (**Kodoatie**, 2005).

b. Jenis-jenis Infrastruktur

Berdasarkan jenisnya, **Grigg**, 1988 menjelaskan bahwa infrastruktur dibagi dalam 13 kategori yaitu:

1. Sistem penyediaan air : waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, dan fasilitas pengolahan air (treatment plant)
2. Sistem pengelolaan air limbah : pengumpul, pengolahan, pembuangan, dan daur ulang
3. Fasilitas pengelolaan limbah (padat)
4. Fasilitas pengendalian banjir, drainase, dan irigasi
5. Fasilitas lintas air dan navigasi
6. Fasilitas transportasi : jalan, rel, bandar udara, serta utilitas pelengkap lainnya
7. Sistem transit public
8. Sistem kelistrikan : produksi dan distribusi
9. Fasilitas gas alam
10. Gedung publik : sekolah, rumah sakit, gedung pemerintahan, dll
11. Fasilitas perumahan public
12. Taman kota: taman terbuka, plaza, dll, serta
13. Fasilitas komunikasi.

Grigg 1988 juga menyebutkan ada enam kategori besar infrastruktur, antara lain :

1. Kelompok jalan (jalan, jalan raya, jembatan);
2. Kelompok pelayanan transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan, bandar udara);
3. Kelompok Komunikasi;
4. Kelompok air (air bersih, air kotor, semua sistem air, termasuk jalan air);

5. Kelompok manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat);
6. Kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar;
7. Kelompok produksi dan distribusi energi (listrik dan gas);

Infrastruktur sendiri dapat dipilah menjadi tiga bagian besar sebagai berikut

1. Infrastruktur keras (*physical hard infrastructure*)
2. meliputi jalan raya dan kereta api , bandara, dermaga , pelabuhan dan saluran irigasi.
3. Infrastruktur keras non-fisik (*non-physical hard infrastructure*)
4. yang berkaitan dengan fungsi utilitas umum seperti ketersediaan air bersih berikut instalasi pengolahan air dan jaringan pipa penyalur; pasokan listrik, jaringan telekomunikasi (telepon dan internet) dan pasokan energi mulai dari minyak bumi , biodiesel dan gas berikut pipa distribusinya.
5. Infrastruktur lunak (*soft infrastructure*)
6. Biasa pula disebut kerangka institusional atau kelembagaan yang meliputi berbagai nilai (termasuk etos kerja), norma (khususnya yang telah dikembangkan dan dikodifikasikan menjadi peraturan hukum dan perundang-undangan) .serta kualitas pelayanan umum yang disediakan oleh berbagai pihak terkait, khususnya pemerintah.

Konsep Pemeliharaan

Pemeliharaan merupakan topik yang penting dan menerima anggaran yang sama besar dengan biaya operasi, pada saat ini konsep pemeliharaan dan operasi tidak berdiri sendiri, dan lebih dikenal dengan istilah O&M (operation and maintenance)

Tahapan Pemeliharaan: dikenal dengan istilah 3R (*repair, replacement, rehabilitation*). Operasi dan pemeliharaan harus dikoordinasikan, pemeliharaan hanya merupakan pendukung dari operasi akan tetapi jika pemeliharaan tidak baik maka pengoperasian akan gagal atau kurang berhasil.

Definisi pemeliharaan termasuk

penilaian kondisi, inventarisasi dan manajemen pemeliharaan (pemeliharaan pencegahan dan pemeliharaan perbaikan atau major and corrective maintenance). Kegiatan penilaian kondisi merupakan penghubung antara fungsi operasi dan pemeliharaan, dan menggambarkan mengapa fungsi tersebut harus dikoordinasikan. Jika kondisi dimulai dengan keadaan buruk, maka operasi akan terpengaruhi sehingga membutuhkan jadwal perbaikan dan pemeliharaan

Strategi pemilihan pemeliharaan yang efektif adalah dengan identifikasi dan analisis yang sistematis dari strategi yang tersedia., seperti:

- a. Hanya mengerjakan pemeliharaan yang kritis saja
- b. Memperbaiki fasilitas yang jelek dahulu
- c. Menggunakan praspesifikasi siklus pemeliharaan
- d. Memperbaiki komponen-komponen dengan kerusakan yang beresiko tinggi
- e. Menggunakan pemeliharaan pencegahan
- f. Membandingkan keuntungan ekonomi dari strategi pemeliharaan tersebut.

Tujuan pemeliharaan jalan adalah untuk mempertahankan kondisi jalan mantap sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan. Bertitik tolak dari kondisi mantap tersebut, pemeliharaan jalan perlu dilakukan secara terus-menerus/rutin dan berkesinambungan khususnya pada jenis konstruksi jalan yang menggunakan sistem perkerasan lentur (*flexible pavement*).

Pemeliharaan jalan tidak hanya pada perkerasannya saja, namun mencakup pula pemeliharaan bangunan pelengkap jalan dan fasilitas beserta sarana – sarana pendukungnya. Penanganan pemeliharaan jalan dapat dilakukan secara rutin maupun berkala. Pemeliharaan jalan secara rutin dilakukan secara terus-menerus sepanjang tahun dan dilakukan sesegera mungkin ketika kerusakan yang terjadi belum meluas. Perawatan dan perbaikan dilakukan pada

tahap kerusakan masih ringan dan setempat. Hal ini dilakukan sehubungan dengan biaya perbaikannya yang relatif rendah dan cara memperbaikinya pun relatif mudah/ringan. Pemeliharaan jalan secara berkala dilakukan secara berkala dengan melakukan pula peremajaan terhadap bahan perkerasan maupun bahan lainnya. Selain itu pun, dilakukan perataan kembali terhadap permukaan jalan. Baik pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan berkala, tidak dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan struktur. Sehubungan dengan hal tersebut, pengendalian dan pengawasan pemeliharaan jalan perlu dilakukan secara rutin maupun berkala agar kerusakan jalan beserta bangunan pelengkap dan fasilitas pendukungnya sejak dini dapat dideteksi jenis dan volume serta cara penanganan yang harus dilakukan segera. Selain itu pun perlu diketahui lokasi kerusakannya, khususnya pada lokasi tertentu yang selalu terjadi kerusakan berulang. Pengendalian dan pengawasan pekerjaan pemeliharaan jalan menjadi penting dalam upaya meningkatkan kemampuan dan pengembangan jaringan jalan yang telah mantap guna melayani lalu lintas transportasi darat dan daerah-daerah yang berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Sesuai dengan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fokus penelitian saat ini adalah :

1. Kualitas layanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado terhadap pemeliharaan jalan daerah.
2. Responsivitas Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado dalam mengenali kebutuhan masyarakat terhadap kenyamanan menggunakan infrastruktur jalan daerah
3. Melihat Responsibilitas Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado apakah sudah sesuai prosedur administrasi atau belum dalam pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur jalan daerah.
4. Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado dalam mengelola sumber

dana untuk pemeliharaan infrastruktur jalan di Kota Manado

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang menurut peneliti sesuai dengan pengamatan yang dilakukan ialah mereka-mereka yang dianggap mempunyai kapasitas, mampu, atau merupakan bagian dari masalah yang sementara diteliti. Adapun informan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado
2. Beberapa Elemen Masyarakat yang dianggap paham dalam masalah penelitian.
3. Masyarakat Umum selaku pengguna infrastruktur jalan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuan-temuan yang berdasarkan permasalahan yang diteliti. Sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan objektif sesuai dengan tujuan penelitian, maka setiap analisa dilakukan untuk melukiskan, menerangkan, mengamati, menggambarkan bahkan meringkas hasil pengamatan yang telah dilakukan dilapangan, mengenai Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan di Kota Manado, serta menjelaskan keadaan subjek penelitian dengan seksama dan sesuai dengan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Di Kota Manado

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado di ukur dari tingkat kualitas pembangunan dan pemeliharaan kotanya. Tuntutan terhadap adanya otonomi daerah dan keinginan untuk adanya suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) di era reformasi disebabkan terjadinya krisis nasionalisme

yang multidimensional yang dihadapi bangsa Indonesia di penghujung abad ke-20. Akuntabilitas kinerja dinas pekerjaan umum merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dinas pekerjaan umum dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodic.

Sistem yang dimaksud adalah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang pada dasarnya merupakan instrument yang digunakan oleh setiap instansi pemerintahan dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategic, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam, rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara / Daerah tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seeluruh instansi pemerintah.

Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh dinas pekerjaan umum kota manado merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang – undang sehingga dapat mendukung jalannya proses pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur jalan di kota manado. Fungsi pengawasan dan ataupun pemeliharaan dianggap sangat penting karena melalui fungsi tersebut maka dapat di ukur juga kinerja dinas pekerjaan umum kota manado dalam melaksanakan program pemeliharaan jalan di kota manado, hal tersebut menjadikan dinas pekerjaan umum secara langsung mempunyai peran penting dalam melaksanakan program tersebut.

Berikut jenis program serta perincian anggaran dana yang dibutuhkan dinas pekerjaan umum kota manado dalam menjalankan program pemeliharaan infrastruktur jalan di kota manado.

1. PROGRAM PEMELIHARAAN/PERBAIKAN

JALAN & JEMBATAN

Nomor : D.09/PU/BM -
15.077 - 01/Kontr./VI/2014
Tanggal : 19 Juni 2014
Program : Pemeliharaan
Jalan & Jembatan
Pekerjaan : Peningkatan
Jalan, jl. Kel. Malalayang Lk. VI
Lokasi : KOTA
MANADO
Nilai Kontrak : Rp.
123,550,000.00
Sumber Dana : APBD 2014
Waktu Pelaksanaan : 150 (Seratus
Lima Puluh) Hari Kalender

Anggaran yang di gunakan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2014. Penulis hanya bisa memperoleh data anggaran di tahun anggaran 2014 dikarenakan dinas pekerjaan umum masih enggan memberikan informasi terbaru soal anggaran yang di anggarkan untuk program pemeliharaan jalan di tahun 2016.

Berikut ini merupakan pernyataan langsung dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado tentang **“Pemeliharaan infrastruktur jalan di Kota Manado dan program apa saja yang sudah dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado ?”** *“Program – program yang sudah dan ataupun sedang di kerjakan oleh kami Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado antar lain Program Rehabilitasi Jalan dan atau dengan kata lain Perbaikan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kota Manado”*

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya apakah program, tersebut berjalan sesuai dengan rencana atau tidak ? berikut pernyataan kepala dinas Pekerjaan Umum Kota Manado tentang program yang sedang berlangsung saat ini. *“menurut saya program yang sedang berjalan saat ini di dinas pekerjaan umum kota manado, masih berjalan sesuai dengan rencana, mengapa karena program pemeliharaan infrastruktur jalan ini telah di programkan dan harus di laksanakan” Tegasnya seperti itu.*

Untuk menunjang data dalam penulisan skripsi ini maka penulis juga menemui sekertaris dinas pekerjaan umum untuk dijadikan sumber informasi selanjutnya.

Pertanyaan yang disampaikan masih menyangkut tentang program yang berjalan yaitu **'Bagaimanakah sistem pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado ?'** dan berikut ini adalah jawaban yang disampaikan oleh sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado : *“Pemeliharaan yang dilakukan oleh dinas pekerjaan umum kota manado ada dua sistem antara lain : yang pertama pemeliharaan rutin swakelola di mana program ini dilakukan oleh dinas pekerjaan umum kota manado sendiri, seperti contoh turun langsung ke lokasi untuk melakukan perbaikan jalan lewat perencanaan terlebih dahulu. Dan yang kedua pemeliharaan secara berkala yakni sistem secara berkala setiap lima tahun dengan sistem kontaktual.”*

Pernyataan di atas menyatakan bahwa program pemeliharaan jalan telah sepenuhnya berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada, namun pernyataan di atas tidak akan lengkap tanpa ada informasi dari masyarakat itu sendiri, maka penulis berinisiatif untuk mewawancarai anggota masyarakat untuk memperjelas penelitian ini. Namun sebelum penulis mewawancarai masyarakat, penulis bertanya kepada Sekretaris dinas pekerjaan umum tentang Apakah dalam menjalankan program ini, ada masyarakat yang datang secara langsung ke Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado untuk melakukan pengaduan tentang ketidaknyamanan infrastruktur jalan di kota manado ? jika ada, bagaimana Dinas Pekerjaan Umum Menanggapi setiap pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan infrastruktur jalan yang rusak ? *“pada prosesnya selalu ada ,masyarakat yang datang untuk melakukan pengaduan ke dinas pekerjaan umum kota manado, dan kami selaku yang bersangkutan merespon apa yang menjadi masalah dari masyarakat itu sendiri dengan cara mendatangi secara langsung lokasi yang mejadi sumber masalah dan melakukan pengecekan secara berkala untuk menyelesaikan masalahnya.”*

Kinerja dinas pekerjaan umum di ukur dari tingkat keberhasilan dari apa yang sedang di kerjakan. Pertanggung jawaban terhadap program – program yang telah dilaksanakan harus sesuai dengan apa yang

terjadi, apabila hal itu tidak berjalan dengan baik, maka akan menimbulkan pertanyaan – pertanyaan dalam pikiran masyarakat dan tentu saja akan menilai bahwa kinerja dinas pekerjaan umum kota manado di anggap melemah.

Upaya pemerintah dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado dalam menggerakkan anggotanya untuk mendukung kegiatan pemeliharaan jalan di daerah harus lebih ditingkatkan lagi dan Selanjutnya penulis juga menanyakan pertanyaan terakhir kepada Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum tentang Jalan dimana saja di kota manado yang menjadi fokus ? dan apakah pemeliharaan jalan berjalan sesuai dengan yang direncanakan ? *“yang menjadi fokus dinas pekerjaan umum kota manado dalam pemeliharaan jalan yaitu di jalan samratulangi, jalan C.H. Taulu, jalan P.M. Tangkilisan, jalan sudirman 15, jallanberingin, jalan sea batas kota, dan jalan pramuka. Untuk pemeliharaan jalannya sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku”*.

Kinerja pengawasan dan pemeliharaan jalan daerah yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado di anggap sudah maksimal dan telah sesuai dengan prosedur yang ada, hal itu dilihat dari kualitas kerja pemerintah dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado dalam menjalankan serta mengawasi program pemeliharaan jalan di daerah yang sudah sesuai.

Namun beda halnya dengan pendapat masyarakat yang menilai kualitas kinerja pemerintah kota dan Dinas Pekerjaan Umum Kota manado yang menganggap kinerja pemerintah tidak efektif dan tidak bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh pemerintah kota masih belum menunjukan yang terbaik,

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan kinerja Dinas pekerjaan kota manado :

1. kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado masih tergolong asal – asalan dan tidak sepenuhnya

berhasil. Itu dikarenakan masyarakat menilai hasil kerja yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang di harapkan masyarakat.

2. Kinerja yang telah ditunjukkan oleh Dinas Pekejaan Umum Kota Manado sudah dianggap baik karena berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, namun tidak oleh masyarakat, karena masyarakat menilai kinerja pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
3. Masih kurangnya sikap transparasi dalam melaksanakan fungsi pengawasannya dan pelaporan terhadap pelaksanaan program pemeliharaan infrastruktur jalan di kota manado.

SARAN

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang kiranya dinilai bermanfaat bagi pihak pemerintah maupun bagi rekan – rekan peneliti berikutnya, antara lain :

1. Dalam melaksanakan tugas dan program – program pemeliharaan jalan, anggota dinas pekerjaan umum kota manado di harapkan mampu menerapkan sistem kerja yang sesuai, agar setiap program yang berlangsung dapat di selesaikan dan dituntaskan sesuai dengan perencanaannya.
2. Tingkatkan lagi pengawasan dalam menjalankan program pemeliharaan jalan di kota manado. Partisipasi anggota dinas pekerjaan umum kota manado di anggap dapat berperan penting dalam suksesnya suatu program.
3. Diharapkan dalam pelaporan dan pengawasan sikap transparansi Anggota maupun Pejabat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado dapat di terapkan agar tercipta pemerintahan yang bersih dan terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

DAFTAR PUSTAKA

- ” Agus Dwiyanto (2013:178)” H. Achmad Amins, Dr. MM – “*Manajemen Kinerja Pemerintahan Daerah*” – Editor : Dr. Ir. H. Alisjahbana, MA – penerbit Laksbang Pressindo Jokjakarta. Samarinda 2009.
- “Amstrong dan Baroon (1998:15)” Irham Fahmi. SE, M.Si – “*Perilaku Organisasi*” (Teori, Aplikasi, dan Kasus) – penerbit Alfabeta Bandung 2016.
- “Bogdan dan Tylor (dalam Maleong, 2000 : 3)” *Prosedur Penelitianmn – Jakarta : Rineka Cipta.*
- “Chaizi Nasucha (2005:129)” *Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah - Jakarta*
- “Dessler (2000 : 41)” H. Achmad Amins, Dr. MM – “*Manajemen Kinerja Pemerintahan Daerah*” – Editor : Dr. Ir. H. Alisjahbana, MA – penerbit Laksbang Pressindo Jokjakarta. Samarinda 2009.
- “Edison Sihombing - dalam salah satu artikelnya yang berjudul “*Mencermati Pendirian Badan Usaha Milik Negara*”
- ” Erwin (2009:131)” *Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah - Jakarta*
- “Gibson, Ivancevich dan Donnelly (1997 : 41)” H. Achmad Amins, Dr. MM – “*Manajemen Kinerja Pemerintahan Daerah*” – Editor : Dr. Ir. H. Alisjahbana, MA – penerbit Laksbang Pressindo Jokjakarta. Samarinda 2009.”
- “Harsey dan Blanchard (1988 : 42)” H. Achmad Amins, Dr. MM – “*Manajemen Kinerja Pemerintahan Daerah*” – Editor : Dr. Ir. H. Alisjahbana, MA – penerbit Laksbang Pressindo Jokjakarta. Samarinda 2009.
- “Indra Bastian (1997:128)” Irham Fahmi. SE, M.Si – “*Perilaku Organisasi*” (Teori, Aplikasi, dan Kasus) – penerbit Alfabeta Bandung 2016.
- “Luthans (2005 : 45)” H. Achmad Amins, Dr. MM – “*Manajemen Kinerja Pemerintahan Daerah*” – Editor :

- Dr. Ir. H. Alisjahbana, MA – penerbit
Laksbang Pressindo Jokjakarta.
Samarinda 2009.
- “Moleong (2000 : 3). – *Prosedur Penelitian –*
Jakarta : Rineka Cipta.
- “Peter dan Yeni Salim (2010:131)” *Kinerja*
Organisasi Pemerintah Daerah -
Jakarta
- “Rival dan Basri (2005 : 42)” H. Achmad
 Amins, Dr. MM – “*Manajemen*
Kinerja Pemerintahan Daerah” –
Editor : Dr. Ir. H. Alisjahbana, MA –
penerbit Laksbang Pressindo
Jokjakarta. Samarinda 2009.
- “Robbins (2000 : 45)”H. Achmad Amins, Dr.
 MM – “*Manajemen Kinerja*
Pemerintahan Daerah” – *Editor :*
 Dr. Ir. H. Alisjahbana, MA – penerbit
Laksbang Pressindo Jokjakarta.
Samarinda 2009.
- “Soetono . 1985 – *Dasar – Dasar Terhadap*
Research . Bandung : Tarsito
- ”Surachmad, Winarto 1985 – *Dasar – Dasar*
Terhadap Research. Bandung Tarsito.
- “Surarsini Arikunto, 1989, *Prosedur*
Penelitian, Bina Aksara, Jakarta
- “Stone (1974:12) dalam “*American Public*
Works Association”
- “Taylor (1994:132)” *Kinerja Organisasi*
Pemerintah Daerah - Jakarta

Sumber – sumber lain :

- “*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi*
Pemerintah (LAKIP) – Peraturan
Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah”
- “*Lembaga Administrasi Negara (LAN)*
Nomor 589/X/6/Y/99 Tentang
Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah”